

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *REAL EARNINGS MANAGEMENT* DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AGGRESSIVENESS*

Sholehudin Adi Nugroho¹⁾, Amrie Firmansyah²⁾

1) Politeknik Keuangan Negara STAN

2 Politeknik Keuangan Negara STAN email: amrie.firmansyah@gmail.com

Abstract

This study is aimed to examine the effect of financial distress, real earnings management, and corporate governance on tax aggressiveness. Using samples from manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2011 to 2015, the data will be examined with fixed effect approach method. The results of this study indicate that financial distress does not affect on tax aggressiveness. While from real earnings management variables, only through manipulation of sales as which affects positive significantly on tax aggressiveness. On the contrary, manipulation of the production and manipulation of discretionary expenses precisely give the opposite effect. In addition, corporate governance consists of the audit committee and the percentage of institutional ownership can reduce tax aggressiveness, meanwhile the third measure (the percentage of independent commissioners) shows the opposite result.

Keywords: *Financial Distress, Real Earnings Management, Corporate Governance, Tax Aggressiveness*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *financial distress*, manajemen laba riil, dan *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness*. Dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2015, data diuji dengan *fixed effect method*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, dari variabel manajemen laba riil, hanya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan yang berpengaruh dalam meningkatkan agresivitas pajak. Adapun dua lainnya yaitu manipulasi produksi dan manipulasi beban diskresionari justru berpengaruh sebaliknya. Selanjutnya untuk *corporate governance*, jumlah komite audit dan persentase kepemilikan institusional menunjukkan mampu menurunkan agresivitas pajak, sedangkan persentase komisaris independen menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Kata kunci: *Financial Distress, Manajemen Laba Riil, Corporate Governance, Agresivitas Pajak*

PENDAHULUAN

Pajak adalah penyumbang penerimaan terbesar di Indonesia. Salah satu tujuan nasional dari Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini mustahil dicapai tanpa adanya dana untuk menggerakkan roda perekonomian dan membangun infrastruktur yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam struktur APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) Republik Indonesia 2016, dana ini sebagian besar ditopang dari penerimaan dalam negeri, secara spesifik diperoleh melalui penerimaan perpajakan yang menduduki porsi 75% dari total penerimaan, disusul selanjutnya pendapatan dari PNB (14%), Kepabeanan dan Cukai (10%), dan sisanya penerimaan hibah. Namun demikian, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun penerimaan perpajakan tidak berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan walaupun secara jumlah rupiah pajak yang dikumpulkan telah mengalami peningkatan. Selain itu, jumlah persentase realisasi penerimaan dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan (data LKPP yang telah diaudit selama periode tahun 2010-2015).

Perusahaan melihat bahwa pajak merupakan biaya atau beban yang harus ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan dalam hal ini manajemen memiliki kecenderungan untuk menjadi agresif dalam perpajakannya. Agresivitas ini tampak dari pajak yang dihindari/digelapkan (Chen et al., 2010). Dengan demikian, merujuk pada pernyataan Chen tersebut faktor penyebab terkait dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak maupun menurunnya persentase realisasi penerimaan dari tahun ke tahun adalah tindakan *tax aggressiveness* (agresivitas pajak) yang dilakukan oleh perusahaan. Definisi *tax aggressiveness* itu sendiri yaitu sebagaimana dinyatakan Frank, et al. (2009) adalah kegiatan manipulasi untuk menurunkan penghasilan kena pajak yang mana bisa saja dikategorikan sebagai penggelapan pajak atau bisa saja tidak dikategorikan sebagai penggelapan pajak. Slemrod (2004) menambahkan bahwa *tax aggressiveness* merupakan kegiatan yang spesifik mengarah kepada transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban

pajak perusahaan. Dengan demikian, menganalisis penyebab daripada *tax aggressiveness* adalah penting mengingat keterkaitannya dengan penerimaan perpajakan.

Salah satu penyebab yang mempengaruhi *tax aggressiveness* adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan (Richardson et al., 2014 dan Edwards et al., 2013). Perekonomian di dunia ini akan selalu mengalami keadaan pasang dan surut. Dengan demikian, kondisi pelaku perekonomian juga tidak akan selamanya baik pula. Contoh nyata dari kondisi perekonomian yang memburuk adalah terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998. Pada saat terjadi krisis ekonomi 1998, kondisi industri di Indonesia mengalami kondisi keuangan yang mengkhawatirkan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), industri yang mengalami pertumbuhan positif hanyalah sektor pertanian, sektor gas, listrik dan air bersih, dan pengangkutan dan komunikasi. Sementara sektor manufaktur mengalami kesulitan keuangan yang sangat buruk (Brahmana, 2004). Pada masa itu banyak industri manufaktur mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan yang tinggi. Beberapa perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang tidak juga berakhir bahkan hingga sampai saat ini dan ketika perusahaan-perusahaan tersebut tidak sanggup lagi mempertahankan status *going concern*-nya karena mengalami kerugian yang terus menerus, memiliki utang yang sangat besar, dan kekurangan kas untuk membayar utang tersebut maka perusahaan itupun di-*delisting* oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penelitian *financial distress* tersebut, telah dilakukan berbagai penelitian terkini di Indonesia yang menghubungkan antara *financial distress* dengan *auditor switching*, rasio keuangan, opini *going concern*, manfaat laba dan arus kas, dan variabel-variabel yang lain. Namun demikian, sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian di Indonesia yang menghubungkan antara *financial distress* dengan aktivitas *tax aggressiveness*.

Selain *financial distress*, isu yang mengemuka pascakrisis ekonomi di tahun 1998 adalah mengenai tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (CG). *Corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar memberikan nilai tambah bagi *stockholder* (Desai &

Dharmapala, 2007). Banyak pihak yang berpendapat bahwa kegagalan negara Indonesia untuk bangkit secara cepat dalam krisis ekonomi 1998 adalah karena lemahnya *corporate governance* (CG) yang diterapkan di Indonesia (Wardhani, 2007). *Corporate governance* yang belum baik ini juga masih dialami oleh perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini.

Oleh karena hal-hal di atas, dalam penelitian ini akan diikuti pula pembahasan mengenai *corporate governance* (CG). Minnick dan Noga (2010) memperlihatkan bahwa penerapan mekanisme CG memiliki arah hubungan yang bervariasi terhadap pembayaran pajak. Dengan demikian memang menurut penelitian ini, peneliti tidak bisa menyamaratakan hubungan *corporate governance* dengan *tax aggressiveness* karena terdapat banyak hal yang mempengaruhi *corporate governance* itu sendiri. Misalnya menurut Minnick, hubungan negatif terhadap pembayaran pajak ditunjukkan oleh jumlah direksi, usia CEO (*Chief Executive Officer*), direksi independen, dan dualisme CEO sebagai ketua dewan akan tetapi hubungan positif ditunjukkan oleh kekuasaan manajerial terhadap pembayaran pajak. Dengan demikian dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan meneliti *corporate governance* tidak menggunakan CG Index akan tetapi dilakukan secara parsial. Tricker (1984) menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki empat kegiatan utama yaitu *direction*, *executive action*, *supervision*, dan *accountability*. Dalam penelitian ini, untuk mewakili keempat hal tersebut digunakan ukuran persentase anggota dewan komisaris independen dan komite audit. Pemilihan kedua ukuran ini karena berdasarkan Richardson et al. (2014) dan Armstrong (2012) menyatakan *corporate governance* akan semakin baik apabila terdapat pengawasan yang lebih baik dari manajemen dimana pengawasan yang lebih baik ini bisa berbentuk adanya komite audit dalam struktur manajemen ataupun anggota dewan yang independen. Xie et al (2013) juga menyatakan bahwa *corporate governance* yang baik dibangun atas dasar komite audit dan dewan komisaris independen yang baik pula.

Persentase anggota dewan komisaris independen ini diukur dengan cara membagi jumlah anggota dewan komisaris independen dengan total jumlah anggota dewan komisaris.

Semakin besar persentase ini, menunjukkan tingkat pengawasan yang dilakukan adalah semakin baik sehingga menunjukkan pula *corporate governance* yang semakin baik. Komite audit diukur dengan cara mengetahui jumlah anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar jumlah ini, menunjukkan tingkat *accountability* yang semakin baik sehingga menunjukkan *corporate governance* yang semakin baik pula. Lebih lanjut, Vishny & Shleifer (1986) menyatakan bahwa kepemilikan institusional juga berperan penting dalam mengawasi dan mempengaruhi manajemen. Hal ini disebabkan semakin banyak institusi di luar perusahaan yang memiliki saham perusahaan, akan semakin meningkat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen karena institusi eksternal turut memberikan pengawasan sehingga mampu mewujudkan *good corporate governance*. Selain itu, kepemilikan institusional juga dimasukkan pula dalam penelitian *corporate governance* ini. Kepemilikan institusional diukur dengan cara membagi jumlah saham perusahaan yang dimiliki institusi di luar perusahaan (misal: lembaga keuangan, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lain) dengan total saham perusahaan yang beredar.

Selain *financial distress* dan kualitas *corporate governance* suatu perusahaan yang mempengaruhi dilakukannya *tax aggressiveness*, *earnings management* atau manajemen laba dapat digunakan untuk menaikkan penghasilan bersih perusahaan setinggi mungkin. Selain itu, kenaikan penghasilan bersih ini juga bisa diikuti oleh turunnya penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan *book tax difference* (BTD) yang merupakan salah satu pengukuran *tax aggressiveness* menjadi semakin lebar dan menyebabkan agresivitas pajak perusahaan tersebut menjadi meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Geraldina (2015) yang menyimpulkan bahwa manajemen laba yang dilakukan manajemen meningkatkan kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax shelter*. Dengan kata lain, perusahaan yang melakukan manajemen laba yang intensif akan agresif pula dalam pelaporan pajaknya. Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap investor masih lemah (Leuz, 2003). Hal ini diindikasikan salah satunya dari dana perlindungan untuk investor

pasar modal yang masih rendah karena perlindungan terhadap investor yang masih lemah ini dibandingkan dengan negara lain menyebabkan manajemen perusahaan di Indonesia melakukan manajemen laba yang lebih intensif pula dibandingkan negara lain (Leuz, 2003).

Manajemen laba sendiri terdiri atas dua jenis yaitu manajemen laba akrual (*accrual earnings management*) dan manajemen laba riil (*real earnings management*). Penelitian Graham et al. (2005) memberikan kesimpulan bahwa para manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba riil daripada manajemen laba akrual. Manajemen laba riil lebih menjadi prioritas dalam penggunaannya oleh manajemen dibandingkan manajemen laba akrual karena manajemen laba riil kurang menarik perhatian auditor dan regulator dibandingkan manajemen laba berbasis akrual sebagaimana penelitian Ratmono (2010) yang berhasil membuktikan bahwa manipulasi aktivitas riil perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang merupakan keputusan operasional tentang produksi, penentuan harga, dan pemotongan beban-beban diskresionari, tidak mendapat perhatian dari auditor. Meski demikian, banyak penelitian akuntansi di Indonesia masih menggunakan variabel manajemen laba akrual dalam melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan manajemen laba, tak terkecuali penelitian yang ingin melihat pengaruh antara manajemen laba dengan *tax aggressiveness*.

Lebih lanjut mengenai alasan ditelitinya manajemen laba riil ini adalah karena adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Geraldina (2013) dan Samingun (2012). Baik penelitian Geraldina dan Samingun menggunakan *dummy variable* dalam mengukur partisipasi perusahaan terlibat dalam *tax shelter*, akan tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Samingun menyimpulkan bahwa manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan memengaruhi secara negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, manajemen laba riil melalui manipulasi beban diskresioner mempengaruhi secara positif signifikan terhadap agresivitas pajak, dan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Geraldina memiliki hasil berbeda dimana manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan mempengaruhi secara positif

signifikan terhadap agresivitas pajak, manajemen laba riil melalui manipulasi beban diskresioner tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap agresivitas pajak, dan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi mempengaruhi secara positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan diteliti kembali pengaruh ini dengan menggunakan pengukuran *tax aggressiveness* yang berbeda.

Kajian Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *financial distress* terhadap *tax aggressiveness*

Richardson et al. (2014) meneliti keterkaitan antara *financial distress*, krisis ekonomi global, dan persentase anggota dewan independen terhadap *tax aggressiveness*. Dalam penelitian ini, Lanis memisahkan pengaruh tiap unsur yaitu pengaruh *financial distress* terhadap *tax aggressiveness* ketika unsur yang lain dianggap sama, pengaruh krisis keuangan global dan dewan komisaris terhadap *tax aggressiveness* ketika unsur yang lain dianggap sama, pengaruh *financial distress* yang berinteraksi dengan *krisis keuangan global* terhadap *tax aggressiveness* ketika unsur yang lain dianggap sama, dan pengaruh *financial distress* yang berinteraksi dengan persentase anggota dewan independen terhadap *tax aggressiveness* ketika unsur yang dianggap sama. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa *financial distress* berhubungan secara positif terhadap praktik *tax aggressiveness* perusahaan serta interaksi antara *tax aggressiveness* dan persentase anggota dewan independen memiliki hubungan positif dengan adanya praktik *tax aggressiveness*.

Sejalan dengan penelitian pada tahun 2014, pada tahun 2015 Lanis, Richardson, dan Taylor kembali meneliti *financial distress*, krisis keuangan global, dan persentase anggota dewan independen. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Lanis menghubungkan ketiga hal tersebut terhadap *tax avoidance* dengan proksi yang berbeda. Penelitian mereka menghasilkan kesimpulan yang serupa dengan penelitian sebelumnya. Edwards (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* menunjukkan peningkatan pada biaya modal, *rating* kredit yang melemah, dan meningkatkan kecenderungan manajer untuk mengambil risiko lebih untuk makin melakukan

tax aggressiveness. Hal ini karena, sebagaimana penelitian Brondolo (2009), *tax saving* mampu menyediakan dana yang dibutuhkan dalam *current operations*, menjaga *rating* kredit, dan menjaga *status quo* atas *debt covenant* dan memitigasi risiko kebangkrutan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H1: *Financial distress* yang dialami perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*

Pengaruh manajemen laba riil terhadap *tax aggressiveness*

Perusahaan menggunakan berbagai teknik manajemen laba, tidak hanya satu teknik saja untuk mencapai target laba (Zang, 2006). Survei menunjukkan bahwa manajer puncak cenderung lebih memilih manajemen laba riil daripada manajemen laba berbasis akrual untuk mencapai target (Graham et al., 2005). Manajemen laba riil ini disebut juga sebagai manipulasi aktivitas riil (*real activities manipulation*). Oleh karena itu, penelitian akuntansi yang mengambil kesimpulan tentang manajemen laba dengan hanya mendasarkan pada pengaturan akrual saja mungkin menjadi tidak valid (Roychowdhury, 2006). Terkait *tax aggressiveness*, Ira Geraldina (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kegiatan manajemen laba suatu perusahaan, baik akrual maupun riil, terhadap aktivitas *tax shelter* yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam *tax shelter* adalah perusahaan yang melakukan kebijakan pajak yang agresif. Dengan demikian, penelitian tersebut juga mengaitkan antara manajemen laba dengan *tax aggressiveness*. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa manajemen laba riil melalui diskresi arus kas operasi dan biaya produksi menaikkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan *tax shelter*.

Dridi dan Boubaker melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan di negara Tunisia untuk mengetahui hubungan antara manajemen pajak dan manajemen laba terhadap *abnormal book tax difference*. *Book tax difference* ini dalam berbagai penelitian seperti Desai dan Dharmapala (2006), Frank et al., (2009), Wilson (2009) Lanis dan Richardson (2014) digunakan sebagai proksi pengukuran untuk *tax aggressiveness*. Hasil penelitian Dridi dan Boubaker menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara

manajemen laba riil dan *BTD* (*tax aggressiveness*). Manajemen laba riil ini bisa dilakukan dengan cara manipulasi penjualan yaitu dilakukan dengan cara menawarkan diskon dan memperlunak masa penjualan kredit. Manipulasi penjualan ini berdampak pada kenaikan penjualan pada periode berjalan (penjualan temporer), akan tetapi menurunkan margin laba kotor akibat diskon yang diberikan serta menurunkan arus kas operasi akibat penjualan kredit. Selain melalui manipulasi penjualan, manajemen laba riil dapat dilakukan pula dengan *overproduction*. *Overproduction* dilakukan dengan cara meningkatkan produksi sehingga dapat menurunkan harga pokok penjualan, meningkatkan laba, namun menurunkan arus kas operasi berjalan. Cara manajemen laba riil yang ketiga yaitu diskresi beban operasi (beban administrasi dan penjualan) dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang menjadi beban periode berjalan sehingga dapat meningkatkan laba dan arus kas operasi perusahaan. Ketiga kegiatan di atas yaitu manipulasi penjualan, mengurangi biaya diskresionari, dan produksi yang berlebih mengakibatkan keabnormalan biaya-biaya seperti *abnormal discretionary expense*, *abnormal cost production*. Manipulasi di atas juga menyebabkan *cashflow* dari operasi menjadi abnormal (*abnormal cash flow operation*). Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah:

H2a: Manajemen laba riil melalui manipulasi arus kas operasi berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *tax aggressiveness*.

H2b: Manajemen laba riil melalui penurunan beban diskresionari berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *tax aggressiveness*

H2c: Manajemen laba riil melalui manipulasi produksi berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *tax aggressiveness*

Pengaruh corporate governance terhadap *tax aggressiveness*

Desai dan Dharmapala (2006) menggunakan data dari S&P Compustat Database periode 1993 s.d. 2001 untuk menjelaskan hubungan *corporate governance* dengan insentif manajemen dan penggelapan pajak. Hasilnya, *corporate governance* yang

buruk menghasilkan kecenderungan penggelapan pajak. Sejalan dengan Desai dan Dharmapala, penelitian Sari dan Martani (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara *corporate governance* yang baik dengan terjadinya penggelapan pajak. *Corporate governance* akan semakin baik apabila terdapat pengawasan yang lebih baik dari manajemen. Pengawasan yang lebih baik ini bisa berbentuk adanya komite audit dalam struktur manajemen ataupun anggota dewan yang independen (Richardson et al, 2014 dan Armstrong, 2012). Richardson, Lanis dan Taylor (2013) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh pengawasan anggota dewan terhadap *tax aggressiveness* dan menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh ini bersifat negatif. Lebih spesifik lagi, Armstrong (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara adanya anggota dewan independen dengan praktik *tax aggressiveness* karena adanya pengawasan lebih yang dilakukan oleh anggota dewan independen. Meski demikian, Chou (2010) menunjukkan hasil yang berkebalikan dengan penelitian Armstrong et al. (2012). Hal ini karena Chou meneliti kinerja anggota dewan independen ketika terjadinya *financial distress*. Chou menemukan hubungan negatif antara anggota dewan independen dengan *financial distress* yang dialami perusahaan. Dalam kondisi *financial distress*, anggota dewan independen cenderung tidak ingin menghadiri *board of meeting*. Hal ini menyebabkan pengawasan yang lebih baik yang dilakukan oleh anggota dewan independen, sebagaimana dinyatakan oleh Armstrong (2012) menjadi terdilusi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah:

H3a: Komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *tax aggressiveness*.

H3b: Persentase anggota dewan independen berpengaruh negatif terhadap praktik *tax aggressiveness*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishney (1986) mengatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer. Khurana dan Moser (2009) melakukan

penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional jangka panjang pada suatu perusahaan, maka akan semakin rendah praktik *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badertscher, Katz, dan Rego (2009). Badertscher, Katz, dan Rego (2009) menyimpulkan bahwa perusahaan yang lebih bersifat privat (kepemilikan institusionalnya tinggi) cenderung lebih rendah melakukan *tax aggressiveness* daripada perusahaan yang lebih bersifat publik (kepemilikan institusionalnya rendah). Berdasarkan penelitian ini, maka hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah:

H3c: kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *tax aggressiveness*

Metode Penelitian

Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana sumber sekunder dalam penelitian ini berupa laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Data sekunder ini antara lain berasal dari www.idx.co.id, www.sahamok.com, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), maupun dari sumber-sumber lainnya yang dianggap sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini populasi meliputi seluruh emiten perusahaan manufaktur meliputi sektor industri dasar dan bahan kimia, aneka industri, serta industri barang konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Sektor manufaktur diambil sebagai populasi, karena sektor tersebut merupakan sektor yang paling dominan dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini, sampel diambil secara *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keuangan secara konsisten tahun 2011 sampai dengan 2015. Pemilihan rentang waktu ini sesuai dengan

masa yang akan diuji yaitu dalam kurun waktu lima tahun.

2. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data keuangan untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 yang diperlukan untuk pengukuran keseluruhan variabel.
3. Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Pemilihan sektor manufaktur ini karena sektor ini merupakan sektor yang dominan dalam perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

Dengan kriteria di atas, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 87 perusahaan dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2011 s.d. 2015 (435 tahun-perusahaan).

Model Penelitian

Berdasarkan gambar di atas, maka model penelitian utama yang akan digunakan adalah dengan persamaan sebagai berikut:

$$TA_{it} = \alpha_0 + \beta_1 FDISTRESS_{it} + \beta_2 AbnCFO_{it} + \beta_3 AbnDE_{it} + \beta_4 AbnPROD_{it} + \beta_5 OUTKOM_{it} + \beta_6 AUDIT_{it} + \beta_7 INST_{it} + \beta_8 SIZE_{it-1} + \beta_9 LEV_{it} + \beta_{10} CAPINT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

TA_{it} : *tax aggressiveness*.

$FDISTRESS$: *financial distress*.

$AbnCFO$: *Abnormal Cash Flow from Operation*

$AbnDE$: *Abnormal Discretionary Expenses*.

$AbnPROD$: *Abnormal Production Cost*.

$OUTKOM$: persentase anggota dewan komisaris independen.

$AUDIT$: jumlah anggota komite audit.

$INST$: persentase kepemilikan institusional.

Variabel kontrol meliputi *firm size* ($SIZE$), *leverage* (LEV), *capital intensity* ($CAPINT$)

ε_{it} adalah *error*.

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel pada persamaan utama. Dengan demikian, digunakan uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM untuk mengetahui manakah pendekatan yang tepat antara OLS (*ordinary least square*), FEM (*Fixed Effect Method*), atau REM (*Random Effect Method*). Hasil pengujian menunjukkan pendekatan yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah FEM (*Fixed Effect Method*).

Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax aggressiveness*. Sementara itu variabel independen dalam penelitian ini adalah *financial distress*, Variabel ini diukur dengan

menggunakan model pengukuran oleh Desai dan Dharmapala yang dimodifikasi oleh Lim (2010). Modifikasian ini lebih baik dibandingkan model sebelumnya (model Desai dan Dharmapala) karena dalam mencari nilai residual (nilai *tax aggressiveness*) digunakan regresi terhadap *discretionary accrual* yang lebih murni dari manajemen laba akrual apabila jika dibandingkan menggunakan model Desai dan Dharmapala yang memakai *total accrual* (Dechow et al., 1995 dan Kothari et al, 2005).

Menurut Lim, *tax aggressiveness* diperoleh melalui dua langkah. Langkah pertama adalah memperkirakan *discretionary accrual*. Caranya dengan mencari total akrual yaitu *net income* dikurangi *cash from operation*.

$$Accruals_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

$Accruals_{it}$: total akrual dari perusahaan i di tahun t

NI_{it} : *net income* perusahaan i di tahun t.

CFO_{it} : *cash flow from operation* dari perusahaan i di tahun t.

kemudian total akrual diskalakan dengan aset tahun sebelumnya (*lagged asset*) dan diregresikan menggunakan formula Dechow et al. (1995) sebagaimana berikut:

$$\frac{Accruals_{it}}{Asset_{it-1}} = \alpha_1 + \beta_1 \frac{\Delta Sales_{it} - \Delta A/R_{it}}{Asset_{it-1}} + \beta_2 \frac{PPE_{it}}{Asset_{it-1}} + e_{it}$$

Keterangan:

$Accruals_{it}$: total akrual dari perusahaan i di tahun t.

$Assets_{it-1}$: total aset perusahaan i di tahun t-1.

$\Delta Sales_{it}$: perubahan penjualan perusahaan i di tahun t.

$\Delta A/R_{it}$: perubahan piutang perusahaan i di tahun t.

PPE_{it} : aset tetap perusahaan i di tahun t.

e_{it} : nilai residu perusahaan i di tahun t.

Nilai residu atau e_{it} pada persamaan di atas adalah *discretionary accrual* (DA) dan akan dimasukan pada langkah selanjutnya.

Langkah kedua dilakukan dengan cara memisahkan komponen *book tax different* yang disebabkan manajemen laba tujuan pajak dari *total book tax different*. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi komponen tersebut sebagai *tax aggressiveness* yaitu dengan cara melakukan regresi OLS pada persamaan berikut ini:

$$BTD_{it} = b_1 DA_{it} + U_i + e_{it}$$

Keterangan:

BTD_{it} : *Book Tax Difference* perusahaan i di tahun t diskalakan dengan *lagged asset*.

DA_{it} : *discretionary accrual* perusahaan i di tahun t diskalakan dengan *lagged asset*

U_i : *average value of residual* perusahaan i

e_{it} : *deviation from average residual* U_i perusahaan i di tahun t

Tax aggressiveness (TA_{it}) pada suatu perusahaan (i) di suatu tahun (t) didapat dengan cara menjumlahkan U_i dengan e_{it} .

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi *financial distress*, *real earnings management* dan *corporate governance* yang Untuk variabel *financial distress*, penelitian Richardson et al. (2014) merujuk pada Altman Z Score yang telah dimodifikasi Graham (1998) dalam menilai tingkat *financial distress* yang dialami oleh suatu perusahaan. Model untuk mengukur tingkat *financial distress* yang dialami suatu perusahaan sebenarnya ada banyak. Beberapa di antaranya adalah Zavgren (1982), Ohlson (1980), Deakin (1977), dan Beaver (1966). Model yang dikembangkan oleh Altman (1968) dan kemudian dimodifikasi oleh Graham (1998) memiliki tingkat prediksi yang sangat tinggi yaitu di atas 60 persen dan ukuran ini telah dipakai di berbagai negara dalam rangka memprediksi kesulitan keuangan suatu perusahaan yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Prediksi tingkat *financial distress* yang ditanggung suatu perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

$$Z = 1,2 (\text{working capital} / \text{total aset}) + 1,4 (\text{labar} / \text{total aset}) + 3,3 (\text{labar} / \text{total aset}) + 0,999 (\text{penjualan} / \text{total aset})$$

dimana semakin besar Z akan menunjukkan semakin rendah level *financial distress* yang dialami perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Z akan ditransformasikan dengan cara nilai Z akan dikalikan -1, sehingga nilai Z hasil transformasi akan menunjukkan kenaikan nilai kesulitan keuangan.

Manajemen laba riil diukur menggunakan pendekatan yang digunakan Roychowdhury (2006). Pendekatan ini dipakai karena pendekatan-pendekatan sebelumnya kebanyakan berfokus hanya kepada *discretionary expense* saja. Adapun pendekatan Roychowdhury meliputi baik *abnormal cash flow operation*, *abnormal discretionary expenses*, maupun *abnormal production costs* (Roychowdhury, 2006).

1. Abnormal Cash Flow Operation

$$CFO_t / A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (S_t / A_{t-1}) + \alpha_3 (\Delta S_t / A_{t-1}) + \varepsilon_t$$

Keterangan:

CFO_t : arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

A_{t-1} : aset total perusahaan i pada tahun $t-1$

S_t : penjualan total perusahaan i pada tahun $t-1$

Model ini akan akan diestimasi setiap tahun. Residual dari hasil estimasi merupakan *abnormal CFO* perusahaan i pada tahun t ($AbnCFO_{it}$).

2. Abnormal Discretionary Expenses

$$DISEXP_t / A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (S_t / A_{t-1}) + \varepsilon_t$$

Dimana $DISEXP_t$ adalah *discretionary expenses* yaitu penjumlahan beban penelitian dan pengembangan, beban iklan, beban penjualan, administrasi, dan umum. Model ini akan akan diestimasi setiap tahun. Residual dari hasil estimasi merupakan *abnormal DISEXP* perusahaan i pada tahun t . ($AbnDE_{it}$)

3. Abnormal Production Costs

$$PROD_t / A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (S_t / A_{t-1}) + \alpha_3 (\Delta S_t / A_{t-1}) + \alpha_4 (\Delta S_{t-1} / A_{t-1}) + \varepsilon_t$$

$PROD_t$ adalah *production costs* yaitu penjumlahan harga pokok penjualan dan perubahan persediaan. Model ini akan akan diestimasi setiap tahun. Residual dari hasil estimasi merupakan *abnormal DISEXP* perusahaan i pada tahun t . ($AbsPROD_{it}$).

Corporate governance suatu perusahaan diukur dengan tiga hal sebagai berikut:

1. Persentase anggota dewan independen

Persentase jumlah anggota dewan komisaris independen diukur dengan cara membagi persentase anggota dewan komisaris yang independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris sebagaimana penelitian Richardson (2014):

$$\frac{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

$$\frac{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

Ukuran ini berdasarkan pernyataan bahwa *corporate governance* yang semakin baik dikarenakan pengawasan yang semakin baik pula dan pengawasan yang semakin baik ini salah satunya diukur dengan persentase anggota dewan komisaris yang independen (Richardson, 2014). Pengawasan adalah salah satu unsur dalam *corporate governance* yang baik.

2. Komite Audit

Komite audit dalam berbagai penelitian biasanya diukur menggunakan *dummy variable* dimana skor 1 (satu) bagi perusahaan yang memiliki komite audit dan skor 0 (nol) bagi perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Ukuran ini berdasarkan kenyataan bahwa *corporate governance* yang semakin baik dikarenakan pengawasan yang semakin baik pula dan pengawasan yang semakin baik ini salah satunya diukur dengan keberadaan komite audit. Namun, merujuk pada Keputusan Ketua

Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 yang sampai sekarang belum diubah di dalamnya mewajibkan perusahaan untuk memiliki komite audit beranggotakan minimal tiga orang. Dengan adanya peraturan ini, maka *variabel dummy* ini menjadi tidak relevan lagi karena perusahaan yang tidak memiliki komite audit tidak akan bisa *listing* dalam BEI. Untuk itu, penulis mengganti pengukuran komite audit dari *variabel dummy* menjadi jumlah anggota komite audit.

3. Kepemilikan Institusional

Konsentrasi kepemilikan institusional ini dapat dihitung dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

Selain itu, dalam penelitian ini memasukkan variabel control yaitu :

1. Size (Ukuran Perusahaan)

Teori akuntansi positif terkait dengan political cost mempostulatkan bahwa perusahaan yang lebih besar akan membayar biaya politis yang lebih besar termasuk di dalamnya pajak penghasilan (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Richardson, 2014). Secara kontras, perusahaan yang lebih besar pula yang mampu memengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka dan berpartisipasi dalam perencanaan pajak (Siegfried, 1972). Size ini diukur menggunakan natural log atas total aset di awal tahun.

2. Leverage

Bunga sebagai pengurang pajak sudah seharusnya berpengaruh positif dan menjadi insentif suatu perusahaan dalam melakukan tax planning (Cheng et al, 2012). *Leverage* dihitung dengan cara utang jangka panjang dibagi dengan total nilai aset.

3. Capital Intensity

Capital intensity digunakan sebagai variabel kontrol untuk menangkap perbedaan antara pelaporan pajak dan pelaporan buku perusahaan yang dapat memengaruhi pengukuran tax aggressiveness (Gupta dan Newberry, 1997). Perusahaan dengan *capital intensity* makin besar akan terdampak lebih

besar akibat perbedaan *treatment* terhadap beban penyusutan yang dilakukan dalam pelaporan perpajakan dengan pelaporan keuangan perusahaan. Capital intensity diukur dengan cara total nilai tanah, peralatan dan bangunan di suatu tahun dibagi dengan total nilai aset di tahun sebelumnya.

Analisis Dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 4.1.
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Med	Max	Min	SD
TA	$5,76 \times 10^{-17}$	-0,007	6,010	-5,691	0,482
FDISTRESS	-1,9950	-1,907	4,870	-15,767	1,737
AbnCFO	-0,121	0,027	1,822	-48,545	2,448
AbnDE	-0,023	0,0130	0,680	-0,923	0,180
AbnPC	0,052	0,075	3,083	-5,334	0,521
AUDIT	3,018	3,000	7,000	0,000	0,885
INST	0,719	0,757	1,000	0,000	0,195
OUTKOM	0,428	0,364	1,000	0,000	0,213
LEV	0,227	0,096	2,518	0,007	0,355
SIZE	27,924	27,76	33,095	24,588	1,611
CAPINT	0,558	0,500	8,269	0,054	0,513

Pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata nilai variabel *tax aggressiveness* pada perusahaan yang menjadi sampel selama 5 (lima) tahun adalah di angka $1,82 \times 10^{-17}$, angka yang sebenarnya sangat kecil akan tetapi tetap saja bernilai positif. *Book tax difference* (BTD) menggambarkan selisih antara laba akuntansi (sebelum beban pajak dan bunga) dengan penghasilan yang akan digunakan untuk menghitung berapa beban pajak perusahaan tersebut. Nilai positif ini diartikan bahwa *book tax difference* yang dilaporkan dalam laporan keuangan lebih besar daripada *book tax difference* yang seharusnya (*book tax difference* normal), sehingga bisa diduga terdapat aktivitas *tax aggressiveness* karena penghasilan yang dilaporkan kepada pemegang saham dalam bentuk laba akuntansi lebih besar daripada penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan.

Nilai minimum dalam analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai terendah dari masing-masing variabel sedangkan nilai

maksimum menggambarkan nilai tertinggi dari masing-masing variabel. Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai maksimum dan minimum untuk variabel *tax aggressiveness* sebesar 6,08 dan -5,69. Nilai paling tinggi menggambarkan bahwa perusahaan tersebut paling gencar melakukan *tax aggressiveness* dan sebaliknya nilai terendah menunjukkan hal yang sebaliknya.

Rata-rata variabel *financial distress* adalah sebesar -1,19. Nilai *financial distress* ini sebenarnya adalah suatu probabilitas yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai *financial distress* suatu perusahaan, maka akan semakin bermasalah pula keuangan perusahaan tersebut. Dengan demikian, jika suatu perusahaan memiliki nilai di atas rata-rata ini, bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang lebih buruk dan memiliki potensi kebangkrutan lebih besar jika dibandingkan perusahaan kebanyakan. Apabila suatu perusahaan memiliki nilai *financial distress* di bawah nilai rata-rata, bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang lebih baik daripada kondisi keuangan perusahaan kebanyakan.

Nilai rata-rata *abnormal cashflow* menunjukkan nilai -0,12. Semakin besar nilai *abnormal cashflow* yang positif menunjukkan bahwa perusahaan semakin tinggi melakukan manajemen laba riil dengan cara memanipulasi penjualan, yaitu dilakukan dengan memberikan diskon yang amat tinggi dan fasilitas kredit lunak sehingga meningkatkan jumlah penjualan meskipun menurunkan *cash flow from operation* daripada yang seharusnya. Demikian pula sebaliknya, nilai rata-rata *abnormal cashflow* menunjukkan nilai -0,12. Angka negatif mengindikasikan bahwa perusahaan secara rata-rata tidak melakukan manajemen laba riil dengan memanipulasi beban diskresioner karena nilai *mean* (rata-rata) menunjukkan hasil yang negatif. Nilai deviasi standar variabel *abnormal cashflow* pada penelitian ini adalah sebesar 2,45. Nilai deviasi standar yang melebihi nilai *mean* (-0,12) menunjukkan bahwa *mean* menjadi buruk jika dipakai untuk merepresentasikan data secara keseluruhan. Nilai maksimum dan minimum variabel *abnormal cash flow* berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 1,82 dan -48,54.

Semakin besar nilai *abnormal discretionary expense* menunjukkan bahwa perusahaan semakin tinggi melakukan manajemen laba riil dengan cara memanipulasi

beban diskresioner, yaitu memanipulasi beban administrasi dan penjualan sehingga mampu meningkatkan laba dan kas operasi perusahaan. Nilai variabel *abnormal discretionary expense* berada di angka -0,023. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan secara rata-rata tidak melakukan manajemen laba riil dengan memanipulasi beban diskresioner karena nilai *mean* menunjukkan hasil negatif. Namun, variabel *abnormal discretionary expense* memiliki deviasi standar sebesar 0,18. Nilai deviasi standar yang melebihi nilai *mean* (-0,023) menunjukkan bahwa *mean* menjadi buruk jika dipakai untuk merepresentasikan data secara keseluruhan. Nilai maksimum dan minimum variabel *abnormal discretionary expense* berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 0,68 dan -0,92.

Nilai variabel *abnormal production* ditunjukkan oleh tabel berada di angka 0,052. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan secara rata-rata melakukan manajemen laba riil dengan memanipulasi produksi karena nilai *mean* menunjukkan hasil positif. Akan tetapi, deviasi standar pada, *abnormal production cost* adalah sebesar 0,52. Nilai deviasi standar yang melebihi nilai *mean* (0,052) menunjukkan bahwa *mean* menjadi buruk jika dipakai untuk merepresentasikan data secara keseluruhan. Nilai maksimum dan minimum variabel *abnormal production cost* berdasarkan tabel adalah sebesar 3,08 dan -5,33.

Variabel persentase komisaris independen memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,39. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel memiliki anggota dewan komisaris independen sebesar 39% dari total seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Peraturan pasar modal Indonesia yaitu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, mewajibkan Perseroan Terbatas untuk memiliki jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Dengan demikian, secara rata-rata perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan dari BEI ini. Kemudian, deviasi standar pada persentase komisaris independen adalah sebesar 0,13. Nilai

deviasi standar yang kurang dari nilai *mean* (0,39) menunjukkan bahwa *mean* menjadi baik jika dipakai untuk merepresentasikan data secara keseluruhan. Nilai maksimum dan minimum variabel persentase komisaris independen berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 1 dan 0.

Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata 3,01. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel di tahun 2011 s.d. 2015 memiliki jumlah anggota komite audit sebanyak 3,01. Merujuk pada Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 yang sampai sekarang belum diubah dimana di dalamnya mewajibkan perusahaan untuk memiliki komite audit beranggotakan minimal 3 (tiga) orang, dengan adanya nilai rata-rata sebesar 3,01 ini maka secara umum perusahaan manufaktur yang menjadi sampel telah mengikuti ketentuan dari Bapepam ini yang sekarang berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih lanjut, standar variabel jumlah komite audit adalah sebesar 0,88. Nilai deviasi standar yang kurang dari nilai *mean* (3,01) menunjukkan bahwa *mean* menjadi baik jika dipakai untuk merepresentasikan data secara keseluruhan. Nilai maksimum dan minimum variabel komite audit berdasarkan tabel adalah sebesar 7 dan 0.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,72. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel memiliki kepemilikan institusional yang sangat tinggi. Kepemilikan yang sangat tinggi ini yaitu sebesar 72% dari jumlah saham yang beredar. Variabel ini memiliki nilai deviasi standar sebesar 0,19. Nilai deviasi standar yang kurang dari nilai *mean* (rata-rata nilai sampel) menunjukkan bahwa *mean* menjadi baik jika dipakai untuk merepresentasikan data secara keseluruhan. Nilai maksimum dan minimum variabel kepemilikan institusional berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 1 dan 0.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.2.
Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Prob.	α	Signifikansi (5%)
FDISTRESS	0,007	0,150	0,05	Tidak Signifikan
ABNCFO	0,009	0,000	0,05	Signifikan
ABNDE	-0,194	0,007	0,05	Signifikan
ABNPC	-0,113	0,000	0,05	Signifikan
AUDIT	-0,007	0,044	0,05	Signifikan
INST	-0,156	0,003	0,05	Signifikan
OUTDIR	0,099	0,001	0,05	Signifikan
CAPINT	0,029	0,0356	0,05	Signifikan
LEV	0,103	0,003	0,05	Signifikan
SIZE	-0,035	0,007	0,05	Signifikan

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Aggressiveness*

Dari tabel di atas diketahui bahwa variabel *financial distress* (FDISTRESS) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan (*tax aggressiveness*) dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H1 ditolak.

Agresivitas pajak yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, secara teori keagenan, tidaklah sesuai dengan harapan *stakeholder*. Pada saat *financial distress* pun, *stakeholder*, lebih khusus lagi investor memandang peningkatan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang berisiko tinggi. Perusahaan sudah dalam kondisi keuangan yang buruk, dan apabila ditambah risiko yang ditimbulkan akibat peningkatan agresivitas pajak menyebabkan kekhawatiran investor mengenai akan meningkatnya probabilitas perusahaan menjadi bangkrut dan dilikuidasi. Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan hilangnya uang yang ditanam oleh investor di dalam perusahaan tersebut. Risiko ini misalnya apabila tindakan menghindari pajak tersebut tergolong ilegal dan diketahui otoritas perpajakan yang menyebabkan sanksi yang makin memberatkan keuangan perusahaan. Dengan demikian, pada kondisi ini terjadi masalah keagenan karena ketidakselarasan antara tujuan manajemen perusahaan dan tujuan investor. Meski demikian, hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari teori yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seburuk apapun kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak akan memicu

perusahaan tersebut untuk meningkatkan *tax aggressiveness* atau agresivitas pajaknya. Demikian pula sebaliknya, sebaik apapun kondisi keuangan perusahaan tidak akan memicu perusahaan tersebut untuk mengurangi agresivitas pajaknya meskipun dalam model penelitian ini telah digunakan variabel kontrol, yaitu ukuran *size*, *leverage*, dan *capital intensity*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dilakukan oleh Richardson et al. (2014), Richardson et al. (2015), dan Feizi et al. (2016). Penelitian mereka menghasilkan kesimpulan bahwa *financial distress* memberikan hasil yang signifikan dan positif atas peningkatan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) suatu perusahaan. Perbedaan ini bisa saja diakibatkan perbedaan karakteristik antara perusahaan-perusahaan yang digunakan dalam sampel penelitian tersebut dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ketika terjadi *financial distress* perusahaan-perusahaan di Indonesia tidaklah mencari tambahan kas atau tambahan keuntungan dengan cara meminimalkan beban pajak.

Pengaruh *Real Earnings Management* terhadap *Tax Aggressiveness*

1. Pengaruh Manipulasi Penjualan

Dari hasil pengujian hipotesis *Abnormal Cashflow from Operation* (AbnCFO) berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan (*tax aggressiveness*) dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H2a diterima.

Pengaruh positif ini dapat diartikan bahwa semakin besar hasil penjualan yang dihasilkan akibat manipulasi berupa pemberian diskon yang tidak wajar, akan meningkatkan agresivitas pajak suatu perusahaan karena membuat perbedaan laba yang dilaporkan akuntansi dan perpajakan menjadi semakin besar. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dridi dan Boubaker (2015) dan Geraldina (2014) yang menghasilkan kesimpulan yang sama mengenai peningkatan manajemen laba riil semacam ini akan diikuti pula oleh peningkatan agresivitas pajak suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan manajemen laba semacam ini karena memang manajemen laba melalui manipulasi penjualan ini memberikan keuntungan ganda. Di satu sisi menaikkan laba akuntansi dan di sisi lain menurunkan penghasilan kena pajak sehingga tidak jarang

pada akhir tahun dan pada acara-cara tertentu akan ditemui diskon-diskon yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang jumlahnya di luar kewajiban.

2. Pengaruh Manipulasi Beban Diskresioner

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel *Abnormal Discretionary Expense* (AbnDE) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan (*tax aggressiveness*) dengan level signifikansi 5%. Dengan demikian, H2b ditolak.

Pengaruh negatif ini dapat diartikan bahwa semakin besar laba akuntansi yang dihasilkan akibat manipulasi berupa minimalisasi beban diskresioner yang tidak wajar (seperti beban penelitian dan pengembangan, iklan, dan penjualan, administrasi, dan umum), akan menaikkan pula penghasilan kena pajak yang jumlahnya lebih besar daripada laba akuntansi. Dengan demikian semakin tinggi manajemen laba riil melalui manipulasi beban diskresioner akan membuat perbedaan laba yang dilaporkan akuntansi dan perpajakan menjadi semakin kecil dan pada akhirnya mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Dari hubungan negatif ini bisa pula dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak bisa melakukan manajemen laba riil melalui beban diskresioner dengan fungsi meningkatkan laba akuntansi, sekaligus menurunkan penghasilan kena pajak. Manajemen perusahaan di Indonesia diharuskan memilih dalam kebijakannya apakah ingin menaikkan laba perusahaannya (dengan meningkatkan manipulasi beban diskresionernya) ataupun melakukan manajemen pajak (dengan menurunkan manipulasi beban diskresionernya). Jadi, antara dua kebijakan yaitu memaksimalkan laba akuntansi atau meminimalkan laba pajak ini bersifat *trade off*. Hubungan negatif ini juga bisa diartikan bahwa di Indonesia ada beberapa jenis beban yang menjadi sasaran manajemen laba riil yang dapat menjadi beban dalam akuntansi, tetapi tidak mampu menjadi beban dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, atas beban tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif yang mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar daripada penghasilan akuntansi. Dalam analisis statistik deskriptif, terlihat rata-rata nilai *abnormal discretionary expense* yang selalu negatif. Geraldina (2014) menyatakan bahwa nilai *abnormal discretionary*

expense yang negatif menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan manajemen laba riil. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak melakukan manajemen laba riil berupa manipulasi *discretionary expense* dalam rangka meningkatkan laba akuntansinya.

Hal ini karena manajemen laba riil berupa manipulasi beban diskresioner berakibat selain menaikkan laba akuntansi, juga menaikkan penghasilan kena pajak perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian ini.

Seandainya ada perusahaan di Indonesia yang melakukan manajemen laba riil semacam ini untuk meminimalkan pajak, hal ini diakibatkan karena ada tekanan dari pihak ketiga. Shackelford dan Shevlin (2001) menyebutkan bahwa hubungan negatif antara manajemen laba dengan agresivitas pajak suatu perusahaan timbul akibat tekanan kontraktual dengan pihak ketiga seperti regulator, kreditor, pemasok, dan lain lain. Dengan demikian, perusahaan di Indonesia yang masih melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi beban diskresioner misalkan saja membuat beban gaji buruh yang tinggi karena tuntutan buruh Indonesia yang semakin gencar akhir-akhir ini, masih akan tetap melakukan hal tersebut karena meskipun membuat laba akuntansi semakin rendah juga membuat penghasilan kena pajak yang semakin rendah pula. Lagipula, penurunan laba akuntansi ini dapat tertutupi apabila perusahaan juga melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan sebagaimana disebutkan di subbab sebelumnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Dridi dan Boubaker (2015) dan Samingun (2012) yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara manajemen laba riil (yang dilakukan melalui manipulasi beban diskresioner) terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan.

3. Pengaruh Manipulasi Produksi

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel *Abnormal Production Cost* (AbnPC) berpengaruh negative secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan (*tax aggressiveness*) dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H2c ditolak.

Pengaruh negatif ini dapat diartikan bahwa semakin besar laba akuntansi yang

dihasilkan akibat manipulasi berupa maksimalisasi produksi yang tidak wajar, akan menaikkan pula penghasilan kena pajak yang jumlahnya lebih besar daripada laba akuntansi. Dengan demikian semakin tinggi manajemen laba riil melalui manipulasi produksi akan membuat perbedaan laba yang dilaporkan akuntansi dan perpajakan menjadi semakin kecil dan pada akhirnya mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Hubungan negatif ini bisa diduga diakibatkan karena perbedaan penerapan penilaian persediaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan akuntansi, yaitu dengan tidak diperbolehkannya metode *LIFO* (*Last in First Out*) dalam menghitung nilai persediaan. Dari hubungan negatif ini bisa pula dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi dengan fungsi meningkatkan laba akuntansi, sekaligus menurunkan penghasilan kena pajak. Manajemen perusahaan di Indonesia memilih dalam kebijakannya apakah ingin menaikkan laba perusahaannya (dengan meningkatkan manipulasi produksinya) ataupun melakukan manajemen pajak (dengan menurunkan manipulasi produksinya). Jadi, antara dua kebijakan yaitu memaksimalkan laba akuntansi atau meminimalkan laba pajak ini bersifat *trade off*.

Dalam analisis statistik deskriptif terlihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) variabel *abnormal discretionary production cost* bernilai positif. Geraldina (2014) menyatakan bahwa nilai *abnormal discretionary expense* yang positif menandakan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba riil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia tetap melakukan manajemen laba riil berupa manipulasi produksi dalam rangka meningkatkan laba akuntansinya meskipun berakibat pula pada peningkatan laba pajak yang lebih tinggi daripada laba akuntansi. Hal ini diduga karena faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia belum efisien digunakan dan belum mencapai kapasitas maksimalnya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia ingin lebih memaksimalkan faktor-faktor produksinya. Hal ini terlihat dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki tenaga kerja yang sangat besar di luar kebutuhan, tetapi belum

memberikan kinerja yang seharusnya. Hal demikian juga berlaku bagi alat-alat produksi lainnya seperti mesin, pabrik, gedung, dan sebagainya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Dridi dan Boubaker (2015) dan Geraldina (2014), yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara manajemen laba riil (yang dilakukan melalui manipulasi produksi) terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan. Perbedaan dengan penelitian-penelitian ini dimungkinkan karena terdapat perbedaan penggunaan sampel penelitian, periode pengamatan, proksi pengukuran dan model regresi yang digunakan. Geraldina (2014) misalnya menggunakan sampel berupa perusahaan manufaktur yang lebih panjang yaitu 10 tahun (2001 s.d. 2010). Geraldina (2014) dalam mengukur tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan juga tidak memakai ukuran perbedaan laba akuntansi dan laba pajak, tetapi memakai kemungkinan suatu perusahaan terlibat dalam *tax shelter*.

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Aggressiveness*

1. Pengaruh Komite Audit

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel komite audit (AUDIT) berpengaruh negative secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan (*tax aggressiveness*) dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H3a diterima.

Pengaruh negatif signifikan dalam penelitian ini bisa diartikan bahwa pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, peningkatan jumlah anggota komite audit mampu mengurangi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena komite audit di perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki anggota-anggota yang kompeten di bidangnya sehingga mampu melakukan fungsi pengawasan dan fungsi akuntabilitas sebagaimana dipersyaratkan pada *corporate governance* yang baik. Hasil berbeda akan ditunjukkan oleh persentase komisaris independen sebagaimana dijelaskan di subbab selanjutnya karena komisaris independen dianggap hanya diisi oleh anggota yang terpilih karena kedudukannya tanpa mengetahui proses bisnis perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2003), Zhou dan Chen (2004), Suaryana (2005), Annisa dan Lulus (2015) dan Dewi dan Jati (2014) yang

menyimpulkan adanya hubungan negatif yang signifikan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2012), Fenny (2014), Singly dan Sukarta (2015) yang mana menyebutkan hubungan antara jumlah komite audit dan penghindaran pajak sifatnya tidak signifikan. Dalam penelitian-penelitian tersebut jumlah komite audit dianggap tidak mampu memberikan jaminan penentuan kebijakan tarif pajak efektif perusahaan. Perbedaan dengan penelitian-penelitian ini dimungkinkan karena terdapat perbedaan penggunaan sampel penelitian, periode pengamatan, dan model regresi yang digunakan.

2. Pengaruh Komisaris Independen

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel persentase komisaris independen (OUTKOM) berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan (*tax aggressiveness*) dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H3b ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Chou (2010) yang menyatakan bahwa peningkatan persentase komisaris independen justru berpengaruh secara positif signifikan atas agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena pada saat-saat tertentu, seperti ketika perusahaan memiliki kesulitan keuangan, justru komisaris independen yang jarang menghadiri rapat-rapat dan pertemuan di perusahaan yang menyebabkan fungsi pengawasan yang disediakan oleh pihak independen menjadi terdilusi dan meningkatkan kesempatan manajemen untuk menggelapkan atau menghindari pajak. Dengan demikian, merujuk pada penelitian Chou (2010) bisa disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki pengaruh positif yang signifikan antara komisaris independen dan *tax aggressiveness* karena fungsi pengawasan anggota dewan komisaris independen yang kurang. Fungsi pengawasan yang kurang ini seperti jarang menghadiri rapat atau pertemuan organisasi untuk membahas kinerja dan pengawasan perusahaan. Fungsi pengawasan yang kurang ini juga bisa diakibatkan penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen hanya sekedar memenuhi ketentuan formal. Sementara, pemegang saham mayoritas masih memegang kendali penting yang mengakibatkan kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Hal ini bisa juga diakibatkan karena pemilihan atau pemberian jabatan komisaris di

Indonesia kurang memperhatikan kompetensi dan integritas komisaris, namun cenderung sebagai penghormatan atau penghargaan saja.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Wibawa (2015) Anisa dan Kurniasih (2011), Sabrina dan Soepriyanto (2013), Meilinda dan Cahyonowati (2013) yang menyatakan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang kendali penting sehingga kerja dewan komisaris tidak meningkat. Surya dan Yustiavandana (2008) menyatakan bahwa pemilihan atau pemberian jabatan komisaris di Indonesia kurang memperhatikan kompetensi dan integritas komisaris, namun cenderung sebagai penghormatan atau penghargaan saja. Selain itu wawasan atau pengetahuan dewan komisaris independen mengenai *core business* perusahaan juga amat kurang dan menyebabkan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan menjadi tidak maksimal.

Hasil penelitian berbeda diperlihatkan oleh Richardson, Lanis dan Taylor (2014) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh antara persentase komisaris independen dan *tax aggressiveness* bersifat negatif. Armstrong (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara adanya anggota dewan independen dengan praktik *tax aggressiveness* karena adanya pengawasan lebih yang dilakukan oleh anggota dewan independen. Perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut bisa saja disebabkan karena objek penelitian yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan objek penelitian berupa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Australia yang memiliki tata kelola yang lebih baik. Selain itu, penelitian dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan objek penelitian yang lebih banyak.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional (INST) berpengaruh negative secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan (*tax aggressiveness*) dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H3c diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang

memiliki kepemilikan institusional yang tinggi telah mampu meredam agresivitas pajak perusahaan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan rata-rata kepemilikan institusional perusahaan-perusahaan di Indonesia yang cukup tinggi yaitu sebesar 72% yang tentu saja akan berperan mengurangi agresivitas pajak suatu perusahaan karena peluang manajemen untuk memiliki saham perusahaan semakin kecil yaitu sebesar 28%. Itu pun dengan asumsi apabila tidak ada saham perusahaan yang dimiliki oleh publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Shleifer dan Vishney (1986) yang mengatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menghasilkan kesimpulan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional jangka panjang pada suatu perusahaan, maka akan semakin rendah praktik *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Penelitian Badertscher, Katz, dan Rego (2009) menyimpulkan pula bahwa perusahaan yang kepemilikan institusionalnya semakin tinggi cenderung lebih rendah melakukan *tax aggressiveness* daripada perusahaan yang kepemilikan institusionalnya rendah.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan hasil penelitian sebagaimana yang dilakukan Mahulae, Pratomo dan Nurbaeti (2015) yang menghasilkan kesimpulan positif secara signifikan, lalu Damayanti dan Susanto (2015), Annisa (2011), Winata (2014) dan Dandy dan Lukviarman (2014) yang menghasilkan kesimpulan tidak signifikannya hubungan antara kepemilikan institusional dan agresivitas pajak. Perbedaan dengan penelitian-penelitian ini dimungkinkan karena terdapat perbedaan penggunaan proksi pengukuran, sampel penelitian, periode pengamatan, dan model regresi yang digunakan.

Simpulan Dan Saran

1. *Financial distress* (kesulitan keuangan) yang dialami suatu perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *tax aggressiveness* (tingkat agresivitas pajak) suatu perusahaan. Hal ini bisa saja disebabkan karena cara untuk mendapatkan keuntungan dan kas ketika terjadi kesulitan keuangan

bukanlah dengan menggelapkan atau menghindari pajak. Cara ini dianggap terlampau berisiko dibandingkan cara-cara lain. Cara lain yang dimaksud misalnya melakukan efisiensi melalui pemecatan pegawai, pengoptimalan mesin, gedung, dan sebagainya.

2. *Real earnings management* (manajemen laba riil) dilihat dari tiga aktivitas sebagaimana disebutkan oleh Roychowdhury (2006) yaitu manipulasi penjualan, manipulasi beban diskresioner, dan manipulasi produksi. Manipulasi penjualan akan terlihat dari nilai *abnormal cashflow* suatu perusahaan yang melebihi dari yang seharusnya. Manipulasi beban diskresioner akan terlihat dari nilai *abnormal discretionary expense* yang melebihi dari yang seharusnya, dan manipulasi produksi akan terlihat dari nilai *abnormal production cost* yang melebihi dari yang seharusnya. Dari ketiga manipulasi ini, ketiganya menghasilkan pengaruh yang tidak sama terhadap tingkat *tax aggressiveness* (agresivitas pajak) suatu perusahaan.
 - a. *Abnormal cashflow* menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Dengan demikian memang perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan manajemen laba riil melalui pemanipulasian nilai penjualan untuk memperbesar nilai laba akuntansi dan menekan nilai beban pajak. Pemanipulasian di sini bisa berbentuk pemberian diskon yang nilainya di luar kewajiban ataupun pemberian fasilitas kredit lunak yang terlampau sering sehingga meningkatkan nilai penjualan akan tetapi menurunkan nilai kas operasi secara tidak wajar.
 - b. *Abnormal discretionary expense* menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Hubungan ini bisa diartikan bahwa ketika perusahaan mengatur laba akuntansinya agar naik, penghasilan kena pajak perusahaan tersebut juga mengalami kenaikan yang jumlahnya melebihi jumlah laba akuntansinya. Dengan demikian, ketika ingin memanipulasi jumlah beban diskresionernya, perusahaan-perusahaan

Indonesia akan memilih apakah ingin berusaha memperbesar laba akuntansinya ataukah ingin memperkecil penghasilan kena pajaknya. Pemilihan ini dikarenakan keduanya tidak bisa berjalan secara beriringan. Dari hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan nilai *abnormal discretionary expense* yang negatif bisa dianggap bahwa secara rata-rata perusahaan di Indonesia tidak melakukan manajemen laba riil dengan cara memanipulasi jumlah produksi ini.

- c. *Abnormal production cost* menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Dengan demikian, *abnormal production cost* memiliki kesamaan hubungan dengan *abnormal discretionary cost*. Sebagaimana *abnormal discretionary cost*, hubungan ini bisa diartikan bahwa ketika ingin memanipulasi jumlah produksinya, perusahaan-perusahaan Indonesia akan memilih apakah ingin memperbesar laba akuntansinya ataukah ingin memperkecil penghasilan kena pajaknya. Pemilihan ini dikarenakan keduanya tidak bisa berjalan secara beriringan. Yang membedakan dengan *abnormal production cost* adalah secara rata-rata perusahaan di Indonesia masih melakukan pemanipulasian produksi ini. Hal ini bisa dilihat pada analisis statistik deskriptif dimana nilai rata-rata *abnormal production cost* menunjukkan nilai positif. Hal ini bisa diduga bahwa perusahaan di Indonesia lebih mengesampingkan kenaikan penghasilan kena pajak yang timbul akibat manajemen laba semacam ini karena perusahaan tersebut merasa perlu untuk menaikkan laba akuntansinya diikuti dengan pemanfaatan faktor-faktor produksi yang belum efisien. Misalnya dalam suatu perusahaan yang memiliki banyak sekali tenaga kerja ataupun mesin di luar kebutuhan tetapi belum menghasilkan produk yang seharusnya (terjadi inefisiensi).
3. *Corporate governance* (tata kelola perusahaan) dilihat dari tiga hal yaitu pengaruh jumlah komite audit, pengaruh persentase anggota komisaris independen, dan pengaruh persentase kepemilikan

institusioal terhadap *tax aggressiveness* (agresivitas pajak). Ketiganya memiliki hipotesis yang sama yaitu berguna untuk menurunkan agresivitas pajak ketika nilai dari *corporate governance* ini meningkat. Akan tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota komite audit memiliki hubungan yang *negatif* signifikan terhadap *tax aggressiveness* suatu perusahaan. Dengan demikian, pada perusahaan-perusahaan di Indonesia jumlah anggota komite audit yang semakin banyak akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan mengurangi tindakan-tindakan manajemen yang bertentangan dengan keinginan *shareholder* seperti melakukan penggelapan atau penghindaran pajak.
- b. Persentase anggota komisaris independen memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *tax aggressiveness* (agresivitas pajak) suatu perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena memang secara jumlah persentase, perusahaan manufaktur di Indonesia rata-rata memiliki persentase komisaris independen yang tinggi yaitu 42,8%. Akan tetapi, penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen diduga hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang kendali penting sehingga kerja dewan komisaris tidak meningkat. Surya dan Yustiavandana (2008) menyatakan bahwa pemilihan atau pemberian jabatan komisaris di Indonesia kurang memperhatikan kompetensi dan integritas komisaris, namun cenderung sebagai penghormatan atau penghargaan saja. Selain itu, wawasan atau pengetahuan dewan komisaris independen mengenai *core business* perusahaan juga amat kurang dan menyebabkan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan menjadi tidak maksimal. Hal-hal inilah yang menyebabkan peningkatan jumlah persentase komisaris independen perusahaan-perusahaan di Indonesia justru menyebabkan peningkatan

tax aggressiveness (agresivitas pajak) suatu perusahaan.

- c. Persentase kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax aggressiveness* (agresivitas pajak) suatu perusahaan. Hal ini karena adanya peningkatan kepemilikan institusional akan mengurangi kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen dan seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Institusi di sini bisa berarti perusahaan lain, bank, lembaga keuangan, atau badan-badan lain. Pemilik yang berupa institusi memainkan peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer. Dengan adanya pengawasan yang lebih dari institusi lain ini, manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang membahayakan pemegang saham seperti keputusan untuk meningkatkan agresivitas pajak. Peningkatan kepemilikan institusional juga mengurangi masalah keagenan yang timbul akibat ketidakselarasan tujuan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengenai penggunaan sampel. Kebanyakan penelitian *tax aggressiveness* di Indonesia menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Agar lebih representatif, penggunaan sampel lain di samping perusahaan manufaktur dapat dipertimbangkan. Dari penggunaan proksi, juga disarankan untuk memakai proksi yang berbeda atau bahkan memakai proksi lebih dari satu dalam penelitian untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Pada proksi *corporate governance*, penelitian selanjutnya dapat memperbaikinya dengan menggunakan indeks.

Daftar Rujukan

- Altman, E. (1968). *Financial Ratios, Discriminant Anaysis, and Prediction of Corporate Bankruptcy*. *Journal of Finance*, 589-610.

- Altman, E. (1993). *Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding, and Dealing with Bankruptcy*, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.
- Annisa, Nuralifmida, A., & Kurniasih. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Auditing UNS*, 95-189.
- Armstrong, C., Blouin, J., Jagolinzer, A., & Larcker, D. (2012). Corporate Governance, Incentives and Tax Avoidance. *Working Paper, University of Pennsylvania*.
- Badertscher, B., Katz, S., & Rego, S. (2009). *The Impact of Private Equity Ownership on Corporate Tax Avoidance*.
- Balakrishnan, K., Blouin, J., & Guay, W. (2011). Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency? *Wharton School, University of Pennsylvania*.
- Beaver, W. (1966). *Financial Ratios as Prediction of Failure*. *Journal of Accounting Research*, 71-102.
- Blaylock. (2011). *Do Managers Extract Economically Significant Rents Through Tax?* *Oklahoma State University, Working Paper*.
- Brahmana, R. (2004). *Identifying Financial Distress Condition in Indonesia*. *Birmingham Business School, University of Birmingham*, 1.
- Brondolo, J. (2009). Collecting Taxes During An Economic Crisis: Challenges And Policy Options. *IMF staff position*, 1-38.
- Chou, H., Li, H., & Yin, X. (2010). *The Effects Of Financial Distress And Capital Structure On The Work Effort Of Outside Directors*. *Journal of Empirical Finance* 17.
- Cohen, D., & Zarowin, P. (2010). *Accrual-Based And Real Earnings Management Activities Around*. *Journal of Accounting and Economics*.
- Deakin, E. (1972). *A discriminant Analysis of Factors of Business Failure*. *Journal of Accounting Research*, 167-179.
- Desai, M., & Dharmapala, D. (2007). *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. *Journal Of Financial economics*.
- Desai, M., Dyck, A., & Zingales, L. (2004). *Theft and Taxes*. *Journal of Financial Economics* 84.
- Dharmapala, D., & Desai, M. (2006). *Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach*. *Harvard University*.
- Dridi, W., & Boubaker, A. (2015). *The Difference between the Accounting Result and Taxable Income in*. *International Journal of Business and Management Vol.10*, 131-144.
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2013). *Financial constraints and the incentive for tax planning*.
- Feizi, M., Panehi, E., Keshavarz, F., Mirzae, S., & Mosavi, S. (2016). *The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE)*. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) Vol.7*, 373-382.
- Fenny, W. (2013). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran. *Tax and Accounting Review Vol.4*.
- Frank, M., Lynch L., & Rego, S. (2009). *Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting*. *The Accounting Review* 84, 467-496.
- Geraldina, I. (2010). Preferensi Manajemen Laba Akrua atau Manajemen Laba Riil dalam Aktifitas Tax Shelter. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Godfrey, Jaime., Allan Hodgson., Ann Tarca, Jane Hamilton, dan Scott Holmes. (2009). *Accounting Theory 7th Edition*. Milton: John Wiley & Sons, Inc.
- Goergen, M., Martynova, M., & Rennebog, L. (2005). *Corporate Governance Convergence: Evidence From Takeover*. *Oxford Review Of Economic Policy*, Vol. 21, No. 2, 243-244.
- Goh, B. (2013). *The Effect Of Corporate Tax Avoidance On The Cost Of Equity*. *Singapore Management University*.
- Graham, J., Lemmon, M., & Schallheim, J. (1998). *Debt, Leases, Taxes, and the Endogeneity of Corporate Tax Status*. *The Journal of Finance*.
- Gujarati. (2004). *Basic Econometry Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill.
- Gupta, S. (1997). *Determinants Of The Variability In Corporate Effective Tax*

- Rates: Evidence From. Journal of Accounting and Public Policy.*
- Healy, P., & Wahlen, J. (1999). *A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting.* *Accounting Horizons*, 365-383.
- Irawan, Putra, H., & Farahmita, A. (2013). *The Effect of Management Compensation and Corporate Governance on Corporate Tax Management.* *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 16(1), 1-17.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.* *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, No. 4.
- Jimenez, C. (2008). *Tax Aggressiveness, Tax Environment Changes, And Corporate.* *DISSERTATION: University Florida*, 84.
- Khurana, I., & Moser, W. (2013). *Institutional Shareholders' Investment Horizons And Tax Avoidance.* *Journal of The American Taxation Association* 35 (1), 111-134.
- Kim, J., Li, Y., & Zhang, L. (2011). *Corporate Tax Avoidance And Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis.* *Journal.*
- Kristanti, F., Rahayu, S., & Huda, A. (2016). *Determinants of Financial Distress on Indonesian Family Firm.* *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219, 440-447.
- Martani, Dwi., & Sari, Dewi K. (2010). *Ownership Characteristics, Corporate Governance, And Tax Aggressiveness.* *Accounting Conference Doctoral Colloquium.*
- Miglani, S., Ahmed, K., & Henry, D. (2014). *Voluntary corporate governance structure and financial Distress.* *Journal of Contemporary Accounting & Economics.*
- Minnick, Kristina, & Noga, T. (2010). *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax.* *Journal of Corporate Finance* 16, 703-718.
- Mouser, W., & Khurana, I. (2009). *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness.* *University of Missouri.*
- Nachrowi, Nachrowi., Hardius Usman. (2006). *Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan.* Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
- Ohlson, J. (1980). *Financial Ratios and Probabilistic of Bankruptcy.* *Journal of Accounting Research*, 109-131.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan
- Plat, H., & Plat, M. (2002). *Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on ChoiceBased Sample Bias.* *Journal of Economics and Finance*, Vol. 26, No. 2, 184-199.
- Reza, F. (2012). *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.* *Skripsi UI.*
- Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2013). *The Impact Of Board Of Director Oversight.* *J. Account. Public Policy.*
- Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2014). *Financial Distress, Outside Directors and Corporate.* *Journal of Banking & Finance.*
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). *The Impact Of Financial Distress On Corporate Tax Avoidance Spanning the.* *Economic Modelling* 44, 44-53.
- Ross, S., David Hillier, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, dan Bradford Jordan. (2012). *Finanza Aziendale.* New York: McGraw-Hill.
- Roychowdhury, S. (2006). *Earning Management Through Real Activities Manipulation.* *Journal of Accounting and Economics*, 335-370.
- Samingun. (2012). *Manajemen Laba untuk Tujuan Pajak: Determinan, Metode, an Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan.* *Disertasi Universitas Indonesia.*
- Shackelford, D., & Shevlin, T. (2001). *Empirical Tax Research in Accounting.* *Journal of Accounting and Economics* 31, 321-387.
- Slemrod, J. (2004). *The Economics Of Corporate Tax Selfishness.* *National Tax Journal* 57(4), 877-899.
- Suaryana, A. (2005). *Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba.* *SNA 8 Solo.*

- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Swingley, C., & Sukarta, I. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba. *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Tricker, B. (2009). *Corporate Governance: Principles, Policies and Practices*. Oxford.
- Tricker, R., & Gower. (1984). *Corporate governance. Strategic Manajemen Journal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- W. Vishny, R., & Shleifer, A. (1997). *A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance*, 737.
- Wardhani, R. (2007). Mekanisme *Corporate Governance* Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.4 No.1*, 96.
- Whitaker, R. B. (1999). *The Early Stage of Financial Distress. Journal of Economics and Finance. Vol. 23. no.2*, 123-133.
- Wilson, R. (2009). *An Examination Of Corporate Tax Shelter Participants. The Accounting Review* 84 (3).
- www.idx.com. (diakses 16 November 2016)
- www.sahamok.com. (diakses 16 November 2016)
- Xie, B., Dadalt, P., & Davidson III, W. (2003). *Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and Audit Committee. Journal of Corporate Finance* 9, 295-316.
- Zhou, J., & Ken Y, C. (2004). *Audit Committee, Board Characteristics, and Earnings Management. Working Papers*.
- Zmijewski, M. (1984). *Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. Journal of Accounting Research* 22.